

# Mencermati Gelombang PHK Buruh di Tahun 2009: Dampak Sosial, Keamanan dan Politik

**Bambang Karsono**

## Pendahuluan

Sejak tahun 2008 hingga beberapa bulan terakhir ini, topik utama dalam dunia industri dan ketenagakerjaan Indonesia didominasi oleh pembicaraan mengenai kemungkinan dan ancaman PHK terhadap para buruh di berbagai industri sebagai dampak dari terjadinya krisis ekonomi global. Situasi industri dan ketenagakerjaan semacam ini jelas tidak menguntungkan, bah-

kan membawa potensi keresahan yang bisa meluas ke berbagai sektor kehidupan. Isu ini telah membuat situasi yang tidak menenangkan dan menyebabkan ketegangan hubungan industrialis dan tentunya juga telah membawa pemerintah untuk berperan ekstra untuk mengatasinya.

Perkiraan tentang dampak krisis ekonomi global yang secara langsung berpengaruh pada industri di dalam negeri, seja-

uh ini sudah mulai menggeliat, meskipun beritanya tertutup dengan berita agenda besar Pemilu 2009. Namun demikian bukan tidak mungkin isu perburuhan ini bisa saja membawa dampak terhadap sektor kehidupan di bidang sosial, keamanan dan politik.

Terlepas dari hal tersebut, isu gelombang PHK telah mendapat tempat tersendiri dan telah menjadi perhatian berbagai pihak untuk diantisipasi secara tepat. Lebih jauh tulisan ini akan mengeksplorasi apakah gelombang PHK yang akan terjadi sepanjang tahun 2009 benar-benar merupakan ancaman nyata atau sekedar isu ekonomi yang dibesar-besarkan untuk kepentingan pragmatis? Selanjutnya, kalau diposisikan sebagai ancaman nyata, seberapa besar gelombang PHK tahun 2009 akan berpengaruh pada kehidupan sosial, keamanan dan politik nasional? Langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan, baik pemerintah maupun dunia usaha? Sebenarnya apakah masalah PHK dan lapangan kerja ini merupakan spot *observation* yang kemudian di-blow-up menjadi masalah, ataukah hal ini merupakan masalah yang permanen negara Indonesia? Pada akhirnya perlu didapatkan solusi bagaimana menyikapi secara

proporsional gelombang PHK ini, menempatkannya sebagai isu nasional, dan karena itu diperlukan sikap kearifan kolektif dari seluruh komponen bangsa dan negara.

### Akar krisis ekonomi global dan gelombang PHK di Indonesia

Sejak awal tahun 2000-an, kelompok kelas menengah ke atas di Amerika dan juga di negara-negara maju lainnya di Eropa, telah memiliki dan menikmati seluruh fasilitas hidup yang memadai bahkan berlebihan. Hampir semuanya telah memiliki rumah. Sehingga kelas menengah Amerika tidak lagi menjadi target pasar perusahaan pengembang perumahan. Sementara, dana-dana menganggur, baik milik perorangan maupun institusi seperti dana pensiun semakin bertumpuk di dunia perbankan, dan terus mencari saluran investasinya. Secara tradisi, dana menganggur ini biasanya menjadikan perusahaan-perusahaan properti sebagai salah satu instrumen investasinya. Namun karena properti bernilai tinggi tidak lagi memiliki pangsa pasar yang besar, akhirnya para pengembang berimprovisasi, dengan menciptakan rumah-rumah kecil, yang memang

diperuntukkan untuk kelas menengah ke bawah. Mirip dengan rumah sederhana di Indonesia.

Investasi di bidang properti kelas sederhana tersebut kemudian dikenal dengan *Subprime Mortgage* (SM), yang merupakan kredit perumahan, yang skema pinjamannya telah dimodifikasi, sehingga mempermudah kepemilikan rumah untuk orang miskin, yang sebenarnya belum layak mendapatkan kredit. Bisnis *Subprime Mortgage* di bidang perumahan ini sempat mengalami *booming*, yang antara lain dipicu oleh rendahnya tingkat suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika, yang hanya 1 s/d 1,75 persen. Tapi, lambat laun memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu kredit macet. Sebab pembelinya adalah mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan, dan mungkin bekerja di sektor informal, sehingga mereka rentan dengan PHK. Pada saat yang sama, suku bunga pinjaman *Subprime Mortgage* ke pihak konsumen tergolong tinggi, sementara suku bunga deposito rendah, akhirnya menarik minat investor kelas kakap (bank, reksadana, asuransi, dana pensiun) untuk membeli surat utang yang diterbitkan perusahaan *Subprime Mortgage*.

Pada Juni 2004, *The Fed*, mulai secara bertahap menaikkan suku bunga sampai mencapai 5,25 pada Agustus 2004. Sejak itu, kredit perumahan sederhana ini mulai bermasalah, akibat nasabah yang gagal bayar semakin banyak. Dampaknya, banyak perusahaan penerbit *Subprime Mortgage* mengalami kerugian karena tidak dibayar nasabahnya. Konsekuensinya, terjadi banyak penyitaan rumah (di Cleveland, Amerika Serikat, misalnya, 1 dari 10 rumah disita). Pasar properti berubah menjadi *seller market*, karena banyak orang yang mau menjual propertinya, dan selanjutnya, harga properti turun sampai 10 persen.

Selanjutnya, investor institusi keuangan yang membeli surat utang *Subprime Mortgage* mengalami kerugian besar, karena surat utangnya hanya bernilai 20 persen dari nominalnya. Maka harga saham atau nilai aktiva bersih dari investor yang memiliki surat utang *Subprime Mortgage* akhirnya berjatuh, dan membuat investor rugi besar.

Selain tidak adanya *capital gain* dan penerimaan *cash inflow* dari kupon bunga *Subprime Mortgage* yang gagal bayar, pada saat yang sama, juga ada kebutuhan dana tunai, karena seba-

gian investor mencairkan investasinya. Parahnya, pada saat bersamaan, semua pihak butuh likuiditas, yang berakibat terjadinya *credit crunch* (kelangkaan likuiditas). Untuk mengatasi kebutuhan likuiditas, mayoritas investor terpaksa menjual portofolionya secara besar-besaran di seluruh dunia, termasuk sahamnya di *Subprime Mortgage*, yang akhirnya memicu anjloknya pasar modal dunia.

Akhirnya, pada September 2008, Pemerintah Amerika turun tangan dengan proposal 700 miliar USD untuk mengatasi masalah yang timbul. Dana talangan itu akan digunakan membeli surat utang *Subprime Mortgage* yang bermasalah. Namun, dana talangan pemerintah Amerika yang luar biasa besar tersebut, sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan, tapi lebih tepatnya hanya menunda persoalan. Sebab, pasar saham yang terlanjur terjun bebas telah mengakibatkan banyak perusahaan di sektor riil yang mengalami kerugian, dan bahkan bangkrut, yang selanjutnya menciptakan efek domino lanjutan.

Situasi yang terjadi pada ekonomi internasional tersebut, dikarenakan mode ekonomi yang dilasanakan selama ini adalah mengandalkan meka-

nisme pasar yang liberal, di mana setiap sektor perokomian terkoneksi satu sama lainnya. Krisis yang terjadi pada Lehman Brothers adalah sebagai bagian dari krisis keuangan di Amerika Serikat yang berdampak bagi perekonomian secara menyeluruh. Karena sifat dasarnya kapitalisme adalah predator dan terkoneksi secara global, maka krisis yang terjadi di Amerika dengan cepat merembet ke daratan Eropa, Australia, Asia dan belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan sektor riil di Amerika, dan juga di Eropa, mulai mengurangi bahkan menghentikan order ke perusahaan mitranya di luar negeri, termasuk sebagian perusahaan di Indonesia. Order yang ditunda atau bahkan dihentikan, tentu saja akan berefek langsung pada kegiatan produksi perusahaan-perusahaan mitranya di negara lain, seperti di Indonesia, yang pada gilirannya mengambil kebijakan efisiensi melalui PHK sebagian karyawan; bahkan sebagian di antaranya menjadi bangkrut. Dari sinilah awalnya gelombang PHK di perusahaan-perusahaan nasional Indonesia, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2009. Dengan kata lain, pada tataran glo-

bal, gelombang PHK tahun 2009 merupakan efek domino lanjutan dari sebuah krisis yang sebenarnya mulai memperlihatkan gelagatnya sejak tahun 2004 di Amerika Serikat.

Bahwa krisis keuangan yang berawal terjadi di Amerika Serikat itu sudah terlihat tanda-randanya beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia menganggap serius sejak tanggal 8 Oktober 2008 ketika IHSG di BEI turun tajam sampai 10,38 persen yang mengharuskan pemerintah menghentikan kegiatan di pasar bursa modal beberapa hari. Kini ancaman terhadap ekonomi Indonesia kembali terjadi yang ditandai dengan makin banyaknya jumlah perusahaan yang memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya akibat menurunnya permintaan dan volume ekspor.

Mencermati gonjang-ganjing perekonomian Indonesia, sebenarnya banyak akibat yang sudah dirasakan dengan adanya krisis keuangan global itu. Baik sisi positif, seperti dinamika harga minyak dunia dan akibat negatif dari turunnya nilai rupiah, berkurangnya nilai ekspor, turunnya investasi atau terjadi *flying out*, namun demikian akibat negatif lebih banyak dirasakan bagi perekonomian Indo-

nesia terutama bagi sektor riil yang mempunyai pangsa ekspor. Dengan berkurangnya ekspor akan memaksa produsen melakukan penyesuaian biaya-biaya, termasuk penurunan kapasitas produksi. Adanya penurunan kapasitas produksi lazim diikuti restrukturisasi. Tahapan restrukturisasi biasanya mengkaji kebutuhan pekerja yang ditandai dengan permintaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampaknya tentu akan berimbas terhadap PHK secara besar-besaran yang mulai dirasakan para pekerja di seluruh tanah air. Dampak krisis ekonomi itu sudah dirasakan di daerah, ditandai dengan adanya perusahaan yang mulai mengurangi hari kerja semula 7 hari menjadi 4 hari kerja seminggu. Sementara perusahaan lain karena tidak mampu lagi beroperasi terpaksa melakukan PHK. Oleh karena itu harus dicarikan solusi untuk menekan gelombang PHK yang bakal terus terjadi. Apalagi turunnya permintaan tidak hanya di pasar internasional, tetapi juga terjadi terhadap pasar domestik.

### Angka Oil PHK

Bagi Indonesia, krisis ekonomi glo-

bal ini cukup memukul dunia usaha. Pada November 2008, Biro Pusat Statistik (BPS) me-release pernyataan yang menyebutkan, hingga pertengahan tahun 2009, angka PHK diperkirakan bisa mencapai 3 juta orang. Buruh yang di-PHK mayoritas berasal dari sektor yang paling terkena dampak resesi, khususnya sektor manufaktur dan perdagangan.<sup>1</sup> Namun, angka realisasi PHK, sampai akhir Maret 2009, masih berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sebab, kasus-kasus PHK masih terus terjadi, dan karena itu data kasusnya masih terus bertambah dan di-update.

Sampai akhir Desember 2008, PHK tercatat telah mencapai 90 ribu orang. Itu merupakan angka resmi dan belum termasuk PHK di sektor informal yang biasanya tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Hasil pengamatan di beberapa sentra industri kecil dan kerajinan, seperti Yogya, Jepara, dan Bandung Selatan, menunjukkan bahwa mungkin PHK informal angkanya jauh lebih besar. Di sentra-sentra tersebut, penutupan usaha rumahan

sudah terjadi lebih dulu dibandingkan sektor formal atau usaha yang berskala besar.<sup>2</sup>

Selanjutnya, menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai daerah disebutkan, sampai Maret 2009 sudah ada 240.000 orang yang kena PHK.<sup>3</sup> Sementara, berdasarkan angka resmi pemerintah realisasi PHK masih berada di bawah angka lembaga lain. Pada 23 Maret 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Medan mengatakan, sejak Oktober 2008 sampai Maret 2009, angka PHK secara nasional sudah mencapai 39.700 kasus. Pada saat yang sama, terdapat sekitar 24.000 orang karyawan juga sudah diusulkan perusahaannya untuk di-PHK.<sup>4</sup> Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PHK atau merumahkan buruh merupakan dampak dari krisis ekonomi global yang

<sup>1</sup> Kompas, Selasa, 02 Desember 2008

<sup>2</sup> Iman Sugema, "Berbagi Kesengsaraan," dalam *Harian Republika*, Senin, 05 Januari 2009

<sup>3</sup> <http://properti.kompas.com/read/xml/2009/03/13/10192542/puncak.phk.usai.pemilu>

<sup>4</sup> <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/03/23/92977/krisis-39700-karyawan-terkena-phk/>

memaksa turunnya nilai ekspor sejumlah industri sekitar 30 hingga 40 persen. Depnakertrans sendiri hanya memiliki data PHK berdasarkan laporan perusahaan. Padahal, menurut para pakar ekonomi, banyak kasus PHK yang tidak dilaporkan, khususnya para pekerja di sektor informal.

Selain PHK dalam negeri, Indonesia juga menghadapi tambahan angka PHK dari kalangan TKI di luar negeri. Pada hari Rabu, 17 Desember 2008, di Semarang, Jawa Tengah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan, Depnakertrans mencatat sekitar 250.000 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merantau di berbagai negara harus kembali ke tanah air setelah kehilangan pekerjaan akibat pengaruh krisis ekonomi global.<sup>5</sup> Selain dua variabel di atas, masih ada variabel ketiga, yakni angkatan kerja baru yang memasuki dunia kerja pada tahun 2009. Namun belum ada data resmi tentang jumlah para pencari kerja pemula ini.

Menurut tim monitoring dampak krisis Depnakertrans per 28 Novem-

ber 2008 ini saja sudah ada 16.988 orang yang di PHK dan 23.927 orang yang akan di PHK. Sementara itu terdapat 6.597 orang yang sudah dirumahkan dan 19.091 orang yang akan dirumahkan. Kemudian membengkak per Maret 2009 menjadi 37.909 orang yang terkena PHK. Data tersebut menurut versi resmi pemerintah, namun data Apindo daerah menyatakan, sampai Maret sudah ada 240.000 orang yang kena PHK. Repotnya, itu terjadi pada sektor-sektor usaha yang penting dan bersifat padat karya, seperti tekstil dan garmen sebanyak 100.000 orang, sepatu 14.000 orang, mobil dan komponen 40.000 orang, konstruksi 30.000 orang, kelapa sawit 50.000 orang, serta pulp and paper 3.500 orang. Belum lagi sudah dipastikan akan ada 100.000 orang buruh migran Indonesia akan dipulangkan dari Malaysia akibat bangkrutnya industri manufaktur di sana. Sebagian besar buruh migran tersebut berasal dari pedesaan Jawa, Nusa Tenggara dan Sumatera.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2008/12/17/seperempat-juta-tki-pulang-akibat-krisis/>

<sup>6</sup> [http://www.spi.co.id /Analisis ekonomi politik: Krisis ekonomi nasional dan internasional dewasa ini. 30 March 2009](http://www.spi.co.id/Analisis%20ekonomi%20politik%20Krisis%20ekonomi%20nasional%20dan%20internasional%20dewasa%20ini.30%20March%202009)

cukup diselesaikan dalam wacana atau diskursus politik saja, namun karena isu ini sangat menarik maka menjadi sangat penting untuk ditampilkan dalam pembicaraan politik. Tidak terkecuali hal ini telah menjadi agenda perebutan hati rakyat dalam pemilu 2009.

Naf tersebut merupakan dampak politik praktis dari gelombang PHK mengingat dalam waktu sekarang ini tengah berlangsung agenda politik bangsa Indonesia yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Secara makro, dampak politik PHK paling berkorelasi erat dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu dalam menyusun kebijakan penekanan angka pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mengalami pasisi yang serba sulit karena harus berhubungan dengan para pengambil kebijakan di level suprastruktur politik maupun infrastruktur politik yang kebanyakan juga memiliki kaitan erat dengan dunia usaha yang nota bene adalah pengusaha. Kondisi tank menarik inilah yang menjadikan dilema pemerintah dalam mengambil langkah untuk menekan PHK di satu sisi juga tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sisi lainnya.

### Langkah antisipasi

Untuk mengurangi dampak PHK secara besar-besaran pemerintah juga harus menyiapkan insentif bagi pengusaha lokal untuk menggarap pasar domestik, dan merekomendasikan untuk mengkaji ulang sistem ekonomi yang selama ini lebih banyak berorientasi ekspor. Dengan memberdayakan pasar domestik diharapkan pangsa pasar yang selama ini belum tersentuh dapat digarap maksimal sehingga membuka peluang pasar yang akan memacu pertumbuhan dan pasar yang memang benar-benar baru.

Selain itu untuk menahan laju penurunan permintaan, alternatif lain yang masih bisa diharapkan yakni antar lain melalui penyerapan anggaran belanja pemerintah yang hingga 15 Oktober 2008 hanya 65 persen dari pagu APBN P Tahun 2008, atau sekitar Rp 458,10 triliun. Jika penyerapan anggaran bisa lebih cepat diharapkan melalui kebijakan itu akan dapat menekan gelombang PHK. Di samping, perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri serta penguatan UMKM.

Karena dampak krisis itu sudah mulai dirasakan sehingga pemerintah harus



sungguh-sungguh menangani masalah ini karena pada akhirnya apabila tidak tertangani dengan benar akan mengakibatkan distabilitas negara atau sering disebut sebagai krisis seri kedua. Sebagaimana saran para ekonom, pemerintah harus bijak mengambil langkah-langkah antisipasi menghadapi krisis keuangan global antara lain dengan tetap menjaga independensi pengambil keputusan, semaksimal mungkin mempertahankan tingkat suku bunga saat ini, peningkatan pagu jaminan simpanan pada Lembaga Keuangan Nasional. Selain itu melalui penginjeksian secara besar-besaran likuiditas ke dalam perbankan nasional, pemberlakuan kontrol devisa terbatas, pembentukan lembaga procurement untuk mengatur transaksi devisa BUMN, keharusan izin bank sentral bagi transaksi arus ke luar modal dalam jumlah tertentu. Termasuk juga kebijakan jaringan pengamanan sosial yang menyeluruh guna mengantisipasi berbagai dampak sosial yang terjadi.

Bila angka PHK diperkirakan sekitar tiga juta orang, berarti diperlukan sekitar tiga juta lapangan kerja baru. Dalam hal ini, pada tanggal 12 Desember 2008, Menteri Keuangan, se usai rapat kabinet terbatas menga-

takan, "Untuk tahun 2009, diperlukan kurang lebih tiga juta lapangan kerja baru".<sup>7</sup> Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan turun dari 6 menjadi 5 persen. Sebagian prediksi menyebutkan pertumbuhan ekonomi akan turun menjadi 4,5 persen.

Berdasarkan rumus pertumbuhan ekonomi, standar Organisasi Buruh Internasional (ILO), setiap pertumbuhan ekonomi satu persen diasumsikan dapat menyerap kesempatan kerja sekitar 400.000 orang. Jadi, idealnya pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya 8 persen agar bisa menyerap kesempatan kerja sekitar 3.200.000 orang setiap tahun.

Dengan demikian gelombang PHK 2009 merupakan tantangan riil di depan mata. Bukan lagi sekedar permainan angka statistik di atas kertas. Untuk itu, meskipun tidak bisa diharapkan akan mampu mengatasi konsekuensi gelombang PHK secara tuntas, namun pemerintah bersama dunia usaha perlu berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi

<sup>7</sup> Harian Kompas, edisi Sabtu, 13 Desember 2008

dampak negatif PHK. Langkah antisipasi pemerintah dan dunia usaha ini dilakukan melalui empat level, sebagai berikut :

Pertama, dari segi regulasi, melalui UU yang mengatur kemungkinan dunia usaha menunda memenuhi syarat gaji berdasarkan upah minimum (pada tingkat regional maupun provinsi dan kota/kabupaten), guna menghindari PHK. Artinya, bagi pemerintah, solusi ini merupakan solusi sementara, dengan tujuan menghindari PHK. Sebab, bila dipaksakan pelaksanaan upah minimum, memang tidak bisa dihindari kebijakan PHK. Pihak dunia usaha menyambut baik kebijakan ini. Namun, menghadapi resistensi dari pihak buruh dan aktivis buruh. Sebab, diasumsikan peraturan ini akan semakin menyudutkan kalangan buruh, dan membuat dunia usaha semakin memiliki legitimasi untuk melakukan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan.

*Kedua*, stimulus ekonomi dalam bentuk stimulus fiskal, yang diharapkan dapat meringankan beban dunia usaha. Meskipun kebijakan ekonomi dikritik banyak pihak, namun dalam skala pengelolaan ekonomi nasional,

tetap diperlukan untuk menghindari dampak negatif gelombang PHK.<sup>8</sup>

*Ketiga*, percepatan sejumlah proyek infrastruktur yang diharapkan dapat menampung tenaga kerja korban PHK, seperti mempercepat pelaksanaan proyek pemerintah yang padat karya.

*Keempat*, mengurangi dampak negatif dari korban PHK, dengan memaksimalkan program-program bantuan sosial, yang sebenarnya, sudah dilakukan pemerintah sebelum krisis global. Dalam hal ini, yang paling fenomenal adalah program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri senilai Rp 10,3 triliun yang dialokasikan Rp 3 miliar/kecamatan/tahun untuk 5.720 kecamatan, untuk pembangunan jalan dan jembatan, air minum, pasar, irigasi dan listrik. Program padat karya seperti PNPM dengan Rp 3 miliar/kecamatan diharapkan bisa me-

<sup>8</sup> Kebijakan stimulus ini dijadikan Man politik, dengan menyebutkan bahwa stimulus fiskal sebesar 93 triliun tersebut hanya menguntungkan orang-orang kaya, dan hanya kurang dari satu persen yang diperuntukkan untuk petani

nyerap sampai ratusan bahkan ribuan tenaga kerja pada skala nasional.

Pemerintah juga akan memaksimalkan dana Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang telah dibentuk oleh Menko Kesra pada bulan Oktober 2008 untuk memberikan jaminan kesehatan, pensiun dan kematian bagi rakyat miskin. Jumlah dana dari Dewan Jaminan Sosial Nasional yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial telah mencapai Rp 22 triliun.<sup>9</sup> Keempat langkah antisipasi tersebut setidaknya dapat mengurangi dampak negatif gelombang PHK akibat krisis global.

### Perlu kearifan kolektif

Satu catatan penting dalam soal gelombang PHK 2009, adalah fenomena ini bukan semata dialami oleh Indonesia. Artinya, gelombang PHK ini terkait dengan kondisi rendahnya permintaan ekspor dari luar negeri

<sup>9</sup> Catatan: bantuan berupa dana dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, merupakan jenis yang tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, sebab fokus pada pemberian jaminan kesehatan, pensiun, dan kematian bagi rakyat miskin. Artinya, masyarakat tidak menerimanya dalam bentuk uang tunai.

terhadap hasil industri Indonesia. Menghadapi krisis ekonomi global ini, tidak ada pilihan lain kecuali menentukan skala prioritas kebijakan ekonomi melakukan proteksi terhadap perekonomian rakyat, sektor ekonomi skala kecil dan menengah, serta mengerem ketergantungan konsumsi penduduk pada barang-barang impor. Regulasi ekonomi untuk proteksi ekonomi rakyat, sehingga menjadi lebih mandiri dan penggalakkan konsumsi produk-produk dalam negeri, akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan selama ini.

Persoalan ketenagakerjaan (perburuhan) memang merupakan problem multidimensional. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya problem di sektor ini, seperti ekonomi, politik, keamanan nasional bahkan intervensi negara asing atau organisasi internasional. Karena itu penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan mendasar. Sebab persoalan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang sistemik, maka penyelesaiannya juga haruslah lewat perbaikan sistem.

Problem yang berhubungan langsung dengan ketenagakerjaan/buruh

umumnya adalah berkaitan dengan masalah upah dan PHK. Dua masalah ini sebenarnya bukan akar masalah, akan tetapi dampak dari penerapan sistem.

Oleh karena itu yang perlu diperbaiki adalah apa yang menjadi akar penyebab tidak dapatnya terpenuhi upah dan penyebab terjadinya PHK. Dalam menghadapi berbagai dampak negatif dari gelombang PHK 2009,

diperlukan kearifan kolektif terutama pemerintah, pengusaha dan para pekerja. Upaya meminimalisasi PHK serta dampaknya yang telah dilakukan pemerintah, perlu didukung agar memperoleh hasil yang maksimal demi terpeliharanya stabilitas sosial, keamanan dan politik. □

Sumber: diolah dari berbagai sumber antara lain (1) H.S. Abdullah (2) Deny Haryatna (3) SY. Arifin.

